

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kembalinya kekuasaan Taliban pada tahun 2021 menandai perubahan drastis dalam dinamika sosial-politik Afghanistan, khususnya terkait pemenuhan hak-hak perempuan. Dalam konteks ini, UN Women berperan sebagai aktor internasional yang berupaya menyebarkan norma kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pendekatan konstruktivisme berbasis norma, *norm entrepreneurship*, serta strategi *multi-level governance*. Penelitian ini menemukan bahwa strategi yang diterapkan UN Women bersifat adaptif dan berhati-hati, mencakup pendekatan seperti *silent diplomacy*, *culturally resonant framing*, dan *local norm articulation*. Upaya ini menunjukkan bahwa UN Women berusaha menyesuaikan strategi normatif global dengan kondisi sosial-budaya lokal yang sangat kompleks dan represif. Dengan aktor lokal dan komunitas perempuan akar rumput menjadi elemen penting dalam mempertahankan ruang advokasi di tengah pembatasan oleh otoritas de facto.

Namun demikian, penyebaran norma kesetaraan gender oleh UN Women di Afghanistan belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam hal perubahan struktural. Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penyebaran norma adalah tidak tercapainya tipping point dalam siklus hidup norma sebagaimana dijelaskan oleh Finnemore dan Sikkink. Taliban sebagai otoritas de facto tidak hanya menolak norma 130 norma internasional mengenai kesetaraan gender, tetapi secara aktif memproduksi dan memberlakukan norma tandingan berbasis

interpretasi ketat atas syariat Islam yang mengakar kuat dalam institusi politik, sosial, dan budaya Afghanistan. Selain itu, ruang partisipasi publik yang sempit, kriminalisasi terhadap aktivisme perempuan, serta larangan terhadap keterlibatan perempuan dalam lembaga internasional menghambat kemampuan UN Women untuk melakukan sosialisasi norma secara lebih luas dan berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya akses informasi, pengawasan yang ketat terhadap organisasi masyarakat sipil, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan, sehingga menurunkan efektivitas strategi normatif yang bersifat transnasional.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa UN Women sebagai organisasi internasional berdasarkan life cycle teori telah dibuktikan hasilnya parsial melihat dari pendekatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan informal, pemberdayaan ekonomi skala kecil, serta diplomasi budaya yang partisipatif, guna menciptakan ketahanan komunitas yang berkelanjutan di tengah situasi represi. Di sisi lain, dukungan dari komunitas internasional juga perlu diarahkan untuk memperkuat jaringan advokasi lintas batas yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma global dan praktik lokal, tanpa menimbulkan resistensi lebih lanjut dari aktor domestik. Dalam hal ini, pemerintah negara-negara donor dan lembaga regional dapat mengambil peran strategis dalam mendorong terbentuknya mekanisme perlindungan bagi para aktivis perempuan Afghanistan yang menghadapi risiko tinggi. Melanjutkan dari temuan tersebut, pada penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dinamika internal pemerintahan Taliban sebagai aktor dominan yang membentuk lanskap sosial-politik Afghanistan pasca-2021.

Eksplorasi ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana ideologi, kebijakan, dan strategi Taliban dalam menanggapi tekanan internasional terkait isu kesetaraan gender dan hak perempuan. Dengan memahami logika normatif serta pertimbangan politik Taliban, penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tantangan dan peluang dalam membangun dialog konstruktif antara norma global dan konteks domestik. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk merumuskan pendekatan advokasi dan diplomasi yang lebih adaptif dan kontekstual, sehingga strategi perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan dapat dirancang secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, advokasi yang dilakukan oleh UN Women dalam memperjuangkan norma kesetaraan gender dan akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan menunjukkan keberhasilan pada tingkat internasional melalui penguatan legitimasi norma dan mobilisasi jaringan advokasi global. Namun demikian, proses internalisasi norma tersebut masih menghadapi hambatan yang signifikan di tingkat domestik akibat struktur politik dan ideologi pemerintahan Taliban yang menolak penerapan norma kesetaraan gender dalam sistem sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam dinamika hubungan antara tekanan norma internasional dan resistensi domestik dalam rezim otoriter dengan menggunakan pendekatan teori hubungan internasional lainnya, seperti *transnational advocacy networks* atau rezim hak asasi manusia internasional. Selain itu, organisasi internasional seperti UN Women diharapkan dapat memperkuat strategi advokasi

transnasional melalui kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi masyarakat sipil, jaringan diaspora Afghanistan serta aktor non-negara lainnya guna memperluas ruang advokasi di luar jalur diplomasi formal dan mempertahankan akses pendidikan perempuan melalui mekanisme alternatif, seperti pendidikan berbasis komunitas dan platform pembelajaran informal, sehingga upaya advokasi tidak hanya menjadi tekanan normatif dalam sistem internasional tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam menjaga keberlangsungan hak pendidikan perempuan di tengah sistem gender apartheid yang masih berlangsung di Afghanistan.